

SKRIPSI

**PERANAN KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA TANAH ULAYAT DI KENAGARIAN SITUJUAH BANDA
DALAM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

*Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

SYAHARA RAMADHANI

1810111092

PRPGRAM KEKHUSUSAN HUKUM PERDATA MURNI (PK I)



Pembimbing :

Hj.Zahara, S.H., M.H

Upita Annggunsuri, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2023

NO.Reg : IV/PK-I/III/2023

PERANAN KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT DI KENAGARIAN SITUJUAH BANDA DALAM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Tanah merupakan bagian dari permukaan bumi yang sangat penting bagi manusia, terutama bagi masyarakat adat. Kerapatan Adat Nagari mempunyai peran penting dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat, sesuai dengan Pasal 15 Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari, Namun demikian pada 3 tahun terakhir 2019-2021 masyarakat lebih memilih penyelesaian sengketa tanah ulayat untuk langsung diselesaikan di Pengadilan Negeri Payakumbuh, tanpa melalui mediasi di Kerapatan Adat Nagari Situjuah Banda Dalam Kabupaten Lima Puluh Kota. Hal ini terlihat dari ada 13 perkara perdata terkait sengketa tanah ulayat yang terdaftar dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Payakumbuh. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-empiris. Adapun rumusan masalah yaitu 1. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat tidak menyelesaikan kasus sengketa tanah ulayat melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Kenagarian Situjuah Banda Dalam Kabupaten Lima Puluh Kota, 2. Bagaimana peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat di Kenagarian Situjuah Banda Dalam Kabupaten Lima Puluh Kota, 3. Kendala yang dihadapi Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat di Kenagarian Situjuah Banda Dalam Kabupaten Lima Puluh Kota dan Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasinya. Dari hasil penelitian diketahui 1) Faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat tidak menyelesaikan kasus sengketa tanah ulayat melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Kenagarian Situjuah Banda Dalam Kabupaten Lima Puluh Kota hanya sebagai lembaga mediasi yang tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, dan rendahnya pengetahuan masyarakat tentang peranan (KAN) . 2) Peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat di Kenagarian Situjuah Banda Dalam Kabupaten Lima Puluh Kota diatur dalam pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang mempunyai wewenang untuk penyelesaian sengketa perkara perdata tanah ulayat melalui musyawarah dan mufakat berdasarkan kesepakatan dalam sidang majelis Kerapatan Adat Nagari. 3) Kendala yang dihadapi oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat di Kenagarian Situjuah Banda Dalam Kabupaten Lima Puluh Kota dan upaya penyelesaiannya yaitu Kendala utamanya Tidak jelasnya ranji-ranji atau silsilah keturunan kaum dan Kurangnya Peran Ninik mamak dalam dalam edukasi ke kemandirian dan upaya penyelesaiannya yaitu dengan Kerapatan Adat Nagari Situjuah Banda Dalam Kabupaten Lima Puluh Kota harus lebih meningkatkan sosialisasi tentang Peranan KAN.

Kata kunci: Kerapatan Adat Nagari (KAN), Penyelesaian Sengketa, Tanah Ulayat.